

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Sementara itu BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum tersebut digambarkan dengan garis kemiskinan.

Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang, 2003).

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan Pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, transportasi, perdagangan, politik dan lain sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Sama halnya dengan Pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta menyejahterakan warga negaranya.

Masalah kemiskinan telah lama ada, adapun usaha serius untuk mengatasi kemiskinan yang telah banyak dilakukan dalam kebijakan Pemerintah daerah untuk melakukan suatu program-program kerja yang telah dilaksanakan. Masalah kemiskinan tertuang dalam UUD 1945 yaitu "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."

Inilah tujuan nasional yang menjadi landasan awal penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tentunya dalam menanggulangi kemiskinan harus diketahui dahulu

makna kemiskinan dan juga kesejahteraan. Sehingga awal dan akhir dari tujuan yang ingin dicapai dapat diketahui.

Selama ini tingkat angka kemiskinan lebih sering di hubungkan dengan tingkat ekonomi. Kondisi tingkat kemiskinan biasanya tidak dilihat dari berapa banyaknya penghasilan berapa banyaknya jumlah penduduk namun kondisi ini harus di ketahui dari segi ruang lingkup tempat tinggal dari masyarakat miskin itu sendiri.

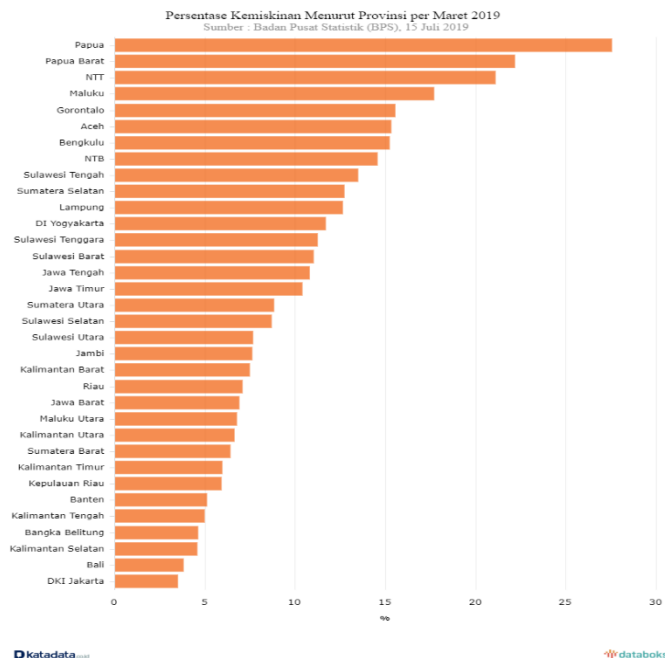
Kemiskinan merupakan masalah yang utama bagi pembangunan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan banyaknya persoalan kemiskinan, persoalan kemiskinan ini bisa di tinjau atau dilihat dari salah satunya tentang sosial, budaya, politik dan ideologi.

Kemiskinan itu bukan hanya problema utama masalah nasional tetapi adapun di daerah. Banyak daerah di Indonesia yang masih cukup tergolong miskin. Adapun yang menonjol dari tingkat kemiskinan di daerah antara lain: (i) banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, (ii) garis ukur

kemiskinan di dasarkan pada pendapatan, (iii) banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.

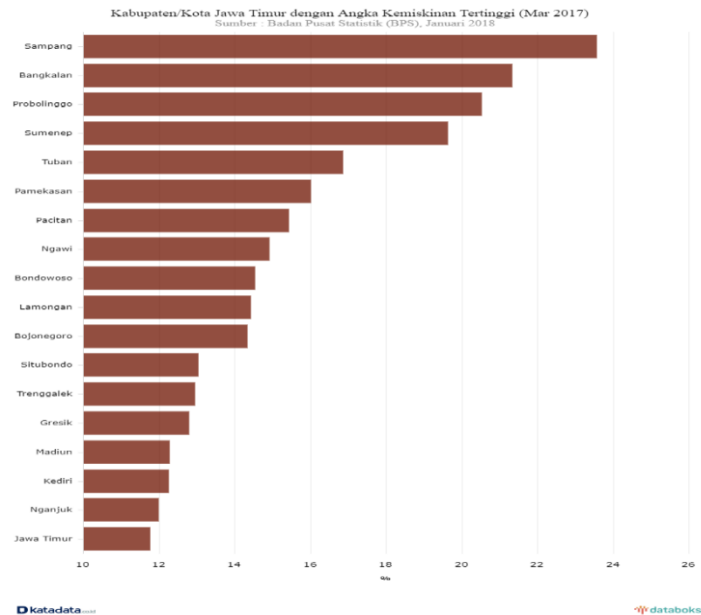
Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga merambah ke setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di bagian timur pulau jawa, Indonesia dengan ibukotanya yang terletak di pulau jawa.

Gambar Grafik 1



Jawa Timur memiliki wilayah terluas 6 provinsi di pulau jawa dan memiliki banyak jumlah penduduk terbanyak kedua di indonesia setelah Jawa Barat. Pada bulan Maret tahun 2017 penduduk miskin di jawa timur sebesar 11,77%

Gambar grafik 2



Salah satu daerah di Jawa Timur yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi adalah Kabupaten Situbondo. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menekan angka kemiskinan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menekan angka kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas 13%.

Perbedaan tingkat kemiskinan yang mencolok antar kabupaten/kota di Kabupaten Situbondo berkaitan dengan distribusi hasil pertumbuhan yang tidak

merata antar wilayah. Selain itu, dapat disebabkan karena standar minimum kebutuhan hidup antar satu daerah dengan daerah lain berbeda, karena sangat tergantung pada kebiasaan/adat, fasilitas transportasi, letak geografis, dan juga perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah seperti perbedaan kualitas infrastruktur terutama pendidikan, kesehatan serta pasar, baik dari sisi ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses.

Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo belum maksimal. Banyak daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakatnya rendah sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Untuk mengatasi kemiskinan adapun hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.

Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan.

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah, dan

masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah dimanfaatkan untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai hasil pertumbuhan ke seluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Maka untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Dan diharapkan sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang meningkat dapat menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten situbondo.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dengan tujuan melihat indikator pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan pendapatan yang termasuk kedalam golongan penduduk miskin. Hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi disektor-sektor yang dimana penduduk miskin bekerja

yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal. (Siregar, 2008).

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). pembangunan manusia didalamnya. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir dari suatu proses pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) adalah perluasan peluang dan pilihan bagi penduduk. Perluasan peluang dan pilihan merupakan proses upaya untuk mencapai taraf yang telah dan ingin dicapai, sehingga upaya-upaya tersebut akan dapat diketahui secara

transparan. Pada proses tersebut pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan antara kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan yang didapatnya. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia tersebut menurut UNDP perlu diperhatikan beberapa hal pokok, yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Produktivitas Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan social. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kesinambungan Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasigenerasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk

berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Selain itu juga penting untuk disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan ukuran yang komprehensif atau bahkan suatu kumpulan indikator yang komprehensif karena banyak dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur. Namun demikian agar konsep pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan kedalam penyusunan kebijakan, maka pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Perencanaan pembangunan yang baik didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perencanaan yang sistematis dan komprehensifnya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat. Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistic sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo.

Fakta telah membuktikan bahwasanya kemiskinan yang terjadi pada saat ini sangat memprihatinkan, dan itu terjadi di seluruh penjuru nusantara termasuk di kabupaten situbondo.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Terpenuhinya kebutuhan dasar menjadi tujuan penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Variabel makro ekonomi mempunyai andil yang sangat besar terhadap tingkat kemiskinan, tingginya laju inflasi, rendahnya investasi, disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah dan antara desa dan perkotaan serta mobilitas atau berjalanya sumber – sumber ekonomi, secara langsung akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, pergerakan sektor riil di pedesaan menjadi bagian penting atas perencanaan program pembangunan. Selama sektor riil pedesaan tidak bergerak secara akseleratif, selama itu pula program pengentasan kemiskinan kurang memberikan hasil yang signifikan. Usaha pengentasan kemiskinan di sadari merupakan kewajiban semua pihak, bagian dari tanggungjawab sosial dan tanggungjawab pemerintah yang tidak bisa disekat dengan waktu, karena kemiskinan itu sendiri bagian dari ornament dunia yang tidak mungkin dapat di bebaskan, seperti pembebasan buta huruf.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan yang ingin di pecahkan dalam masalah ini adalah:

1. Apakah IPM secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo?
2. Pertumbuhan ekonomi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo?

3. Tingkat Pendidikan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo?
4. Gini Ratio secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM yang dapat mempengaruhi Tingkat kemiskinan di kabupaten situbondo
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan di kabupaten situbondo
3. Untuk mengetahui Pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan di kabupaten situbondo
4. Untuk mengetahui dampak Gini Rasio terhadap Tingkat kemiskinan di kabupaten situbondo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini, dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengentaskan tingkat kemiskinan.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi-instansi terkait dalam mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten situbondo.